

**RESPON DUNIA TERHADAP KUDETA MILITER MYANMAR****Padlika Garmabar****Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Singaperbangsa Karawang****Email: [2010631260063@student.unsika.ac.id](mailto:2010631260063@student.unsika.ac.id)****ABSTRAK**

*Kudeta militer Myanmar terjadi pada 1 Februari 2021, junta militer mengambil alih kendali kekuasaan negara. Militer Myanmar menganggap adanya kecurangan dalam pemilu pada November 2020. Tindakan ini dipertahankan oleh militer karena sesuai secara hukum dengan menggunakan konstitusi untuk mengambil alih pada saat-saat darurat. Kudeta Myanmar mendapatkan respon beragam dari dunia internasional. PBB secara langsung mengeluarkan pernyataan tegas terkait kudeta militer Myanmar. Menteri Luar Negeri kedua Brunei Darussalam, Erywan Yusof ditunjuk sebagai utusan khusus Myanmar oleh ASEAN. Indonesia juga merespon melalui halaman resmi Kementerian Luar Negeri, Indonesia meminta semua pihak untuk menahan diri agar terciptanya situasi yang kondusif. Hukum internasional dalam hal ini tidak mengatur dengan jelas bagaimana aksi kudeta militer dipandang. Piagam PBB hanya mengatur semua negara untuk tidak ikut campur dan memiliki posisi yang sama dalam prinsip kesetaraan dan non-intervensi. Piagam ASEAN hanya mengatur negara anggotanya untuk patuh terhadap rule of law yang ada. ASEAN tidak mengatur dengan jelas sanksi apabila ada anggota yang melanggar prinsip tersebut.*

*Kata Kunci: Kudeta Myanmar, Militer, PBB, ASEAN, Hukum Internasional*

**ABSTRACT**

*Myanmar's military coup occurred on February 1, 2021, the military junta took over the reins of state power. The Myanmar military considers the election fraud in November 2020. This action is maintained by the military because it is in accordance with the law by using the constitution to take over in times of emergency. The Myanmar coup received mixed responses from the international community. The United Nations directly issued a statement regarding the military coup of Myanmar. Brunei Darussalam's second foreign minister, Erywan Yusof, was appointed as the special envoy for Myanmar by ASEAN. Indonesia Also responded through the official page of Foreign Affairs, that Indonesia asked all parties to exercise restraint in order to create a conditional situation. International law in this case does not clearly regulate how military coup actions are viewed. The United Nations Charter only regulates all countries not to interfere and have the same position in participatig and not to interfere. The ASEAN Charter only regulates its member countries to comply with the existing legal rules. ASEAN does not clearly regulate sanctions if any member violates these principle.*

*Keywords: Myanmar Coup, Military, PBB, ASEAN, International Law*

**PENDAHULUAN**

Myanmar atau Republic of Myanmar pada Senin, 1 Februari 2021, militer Myanmar telah melakukan kudeta terhadap pemerintahan resmi. Militer Myanmar menuduh terjadinya kecurangan dalam hasil pemilu pada November 2020. Dalam hal ini mereka juga menahan beberapa tokoh senior, Presiden Myanmar Win Myint, dan Kanselir Aung San Suu Kyi. Semenjak Myanmar merdeka dari pemerintahan kolonial Inggris, Myanmar telah mengalami

beberapa kali kudeta pada tahun 1962 dan 1988. Kudeta Myanmar yang pertama kali terjadi pada tahun 1962, empat belas tahun setelah kemerdekaan. Di bawah pimpinan Jendearal Ne Win, Tatmadaw menggulingkan pemerintahan yang kemudian menggunakan rezim otoriter sebagai gantinya. Militer Myanmar saat itu menganggap pemerintahan sipil gagal dalam menindak gerakkan etnis minoritas dan sayap bersenjata.

Dalam masa pemeritahan militer menerapkan ideologi dengan istilah “Burmese Way to Socialism” sebagai dasar bagi sistem politik dan ekonomi. Myanmar pada masa itu cenderung menutup diri dari dunia internasional, seperti membatasi visa pendatang, mengusir akademis asing dan berbagai yayasan internasional.

Kudeta Myanmar yang kedua terjadi pada tahun 1988, ketika itu militer kembali melakukan kudeta. Demonstrasi besar-besaran terjadi pada 8 Agustus 1988 di Myanmar yang dikenal sebagai “8888 Uprising”. Demonstrasi terjadi karena ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintahan yang dianggap gagal. Dalam demonstrasi ini Aung San Suu Kyi muncul sebagai aktivitis pro demokrasi. Ia kemudian membangun partai Liga Nasional NLD. Demonstrasi ini menyebabkan 3000 sampai 10.000 ribu nyawa melayang, walaupun pihak militer mengklaim hanya 350 orang meninggal.

Pada tahun 2011, Myanmar mulai melakukan perubahan politik. Pemilu pertama dilaksanakan pada tahun 2010 yang dimenangkan oleh *Union Solidarity and Development Party (USDP)* walaupun menimbulkan banyak kontra dalam pelaksanaannya dan mendapatkan protes dari partai oposisi. Presiden Thein Sein akhirnya pada tanggal 4 Februari diangkat sebagai presiden sipil pertama di Myanmar. Presiden Thein Sein melakukan reformasi besar-besaran dibidang politik dan ekonomi dengan membuka Myanmar terhadap dunia internasional, melepaskan tahanan politik, dan kebebasan dalam berinternet serta perbaikan infrastruktur dalam untuk mendukung perekonomian.

## **KERANGKA ANALISIS**

Isu kudeta Myanmar kembali menggemparkan dunia politik Internasional. Isu ini adalah isu jangka panjang yang terus menjadi perhatian dunia Internasional karena tak kunjung menemukan jalan damai. Isu ini terbilang rentan dikarenakan melibatkan pemerintahan Myanmar serta masyarakatnya. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengulas lebih dalam mengenai bagaimana respons dunia Internasional terkini terhadap Kudeta Myanmar.

Penulis menggunakan beberapa referensi dalam menulis jurnal ini. Referensi digunakan penulis sebagai landasan untuk mengembangkan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya

mengenai Kudeta Myanmar ini. Penelitian ini menggunakan jurnal yang berjudul “Krisis Politik dan Intervensi Myanmar” oleh Sita Hidriyah yang dipublikasikan melalui [berkas.dpr.go.id](http://berkas.dpr.go.id). Dalam jurnal krisis politik Myanmar dan intervensi ASEAN dijelaskan bahwa ASEAN tidak dapat melakukan intervensi terhadap konflik Myanmar dikarenakan sebagaimana yang sudah tertera dalam Piagam ASEAN dimana adanya prinsip non-intervensi yang berarti krisis politik yang terjadi di Myanmar menjadi urusan dalam negeri. Non-intervensi ini diartikan sebagai mencampuri urusan dalam negeri negara lain tanpa persetujuan negara yang sedang menghadapi konflik, maka dari itu ASEAN tetap berkontribusi untuk mencari solusi terbaik atas konflik yang sedang terjadi di Myanmar namun sebisa mungkin tidak menyentuk birokrasi negara yang bersangkutan.

Sedangkan mengenai solusi alternatif yang dikeluarkan PBB terhadap Myanmar dapat dibidang melibatkan masyarakat internasional karena kudeta militer dan kekerasan yang dialami masyarakat Myanmar telah menyita internasional. Beberapa negara seperti USA, Australia, Selandia Baru, Kanada dan beberapa negara di Uni Eropa mengecam keras kekerasan terhadap aksi unjuk rasa damai massa pro demokrasi dan anti kudeta di Myanmar. Solusi pertama yang ditawarkan PBB mengajak tatmadaw untuk menyerahkan kekuasaan kepada pemerintah sipil, namun rekonsiliasi harus memerlukan dorongan melalui negosiasi antara pihak militer dan sipil. Solusi kedua membentuk pemerintahan sementara dengan pemimpin dari pihak netral bukan dari militer maupun sipil. Pembentukan ini dapat terlaksanakan dengan catatan pihak tatmadaw setuju karena menolak mengembalikan kekuasaan. Solusi ketiga yaitu dilakukannya pemilu ulang setelah pernyataan tidak sahnya hasil pemilu November 2020 dengan jangka waktu satu tahun sesuai dengan kehendak tatmadaw.

Berdasarkan referensi dan landasan teori yang sudah dijabarkan penulis merasa penting hal nya untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai respon dunia Internasional mengenai isu kudeta Myanmar.

#### **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah deskriptif-analisis, dimana berusaha mengumpulkan, menyusun, menginterpretasikan data yang kemudia dianalisis. Sedangkan, teknik pengumpulan menggunakan library research melalui pengumpulan data dari buku, jurnal ilmiah, dokumen, media massa, laporan lembaga pemerintah maupun non-pemerintah.

## **PEMBAHASAN**

### **Alasan terjadinya kudeta militer Myanmar**

Pada Senin 1 Februari 2021, Myanmar mengalami kudeta untuk kesekian kalinya. Kudeta ini terjadi akibat klaim dari militer yang menganggap adanya kecurangan dalam pemilu yang berlangsung pada November 2020, walaupun komisi pemilihan mengatakan tidak ada bukti untuk mendukung klaim tersebut. Militer Myanmar dalam kudeta ini menahan beberapa tokoh senior, Presiden Myanmar Win Myint, dan Aung Suu Kyi.

Kekuasaan di Myanmar saat ini dipimpin oleh panglima tertinggi Min Aung Hlaing. Pengambilalihan ini terjadi karena militer Myanmar menganggap pemerintahan gagal untuk menindaklanjuti kecurangan. Militer juga menganggap pemerintahan gagal untuk menunda pemilihan dikarenakan pandemi virus corona. Tindakan ini dipertahankan oleh militer karena sesuai secara hukum dengan menggunakan konstitusi untuk mengambil alih pada saat-saat darurat. Usai kudeta, Min Aung Hlaing mengeluarkan pernyataan kepada publik bahwa tindakan yang dilakukan militer itu benar dengan berada di pihak rakyat dan akan membentuk demokrasi yang adil. Dalam hal ini militer akan melakukan pemilihan yang adil dan bebas usai keadaan darurat selesai.

Kudeta ini ditentang banyak pihak yang mendukung demokrasi di Myanmar dan mulai melakukan demonstrasi. Protes terhadap kudeta yang dilakukan oleh militer terjadi secara besar-besaran setiap harinya. Aksi mogok juga terjadi atas bentuk protes terhadap kudeta yang terjadi. Pasukan militer Myanmar dalam demonstrasi ini telah membunuh para demonstran yang memprotes kudeta, menahan jurnalis yang memberitakan kekerasan dalam kudeta militer yang terjadi di Myanmar. Para demonstran tetap memenuhi jalan walaupun banyak terjadi kekerasan hingga puluhan orang tewas oleh militer Myanmar. Dalam hal ini, militer memiliki keunggulan dari segala arah, seperti jaringan mata-mata yang tersebar, senjata yang canggih, dan kemampuan memutus jaringan telekomunikasi serta pengalaman dalam berperang dari konflik sipil di perbatasan negara (D.V.Putsanra, Kasus Myanmar Sekarang : Penyebab Demo yang Tewaskan Angel & Lainnya, 2021).

### **Respon dunia terhadap kudeta militer Myanmar**

Kudeta yang terjadi di Myanmar mendapatkan respon yang beragam dari dunia internasional. Dalam hal ini Dewan Keamanan PBB mengeluarkan pernyataan tegas terkait kudeta militer di Myanmar. Melalui pernyataannya hari Rabu 10 Maret 2021, dewan meminta militer menahan diri dan tidak melakukan kekerasan kepada para demonstran.

Dewan Keamanan PBB secara khusus mengutuk keras tindakan kekerasan terhadap aksi damai demonstran, termasuk perempuan dan anak-anak serta menyerukan pembebasan segera orang yang ditahan. Secara khusus juga menekankan semua pihak untuk menghormati kebebasan fundamental, HAM, dan menegakkan supremasi hukum. Selain itu, dewan menyatakan keprihatinan yang mendalam atas pembatasan tenaga medis, anggota serikat pekerja, pekerja media, jurnalis, dan masyarakat sipil. Pernyataan ini merupakan versi revisi dari pernyataan pertama karena China dan Rusia yang memegang hak veto, merasa “kudeta militer” belum bisa digunakan untuk saat ini (News, 2021).

PBB menawarkan solusi alternatif kepada Myanmar karena kudeta militer dan kekerasan yang dialami masyarakat Myanmar menyita perhatian dunia internasional. Solusi pertama yang ditawarkan PBB, mengajak tatmadaw untuk menyerahkan kekuasaan kepada pemerintahan sipil, namun rekonsiliasi ini perlu memerlukan dorongan melalui negosiasi antara pihak militer dan pihak sipil. Solusi kedua dibentuknya pemerintahan sementara dengan pemimpin dari pihak netral bukan dari pihak militer ataupun pihak sipil. Pembentukan ini dengan catatan pihak militer Myanmar setuju karena menolak untuk memberikan kekuasaan terhadap sipil. Solusi ketiga yang ditawarkan PBB yaitu melakukan pemilu ulang setelah pernyataan tidak sah pemilu November 2020 dengan jangka waktu satu tahun sesuai dengan kehendak tatmadaw (berkas.dpr.go.id, 2021a)

Amerika Serikat juga ikut mengancam akan bertindak untuk merespons kudeta militer di Myanmar. Dalam hal ini, Amerika Serikat mengancam segala upaya untuk menghalangi transisi demokrasi Myanmar atau mengubah hasil pemilu dan akan mengambil tindakan kepada mereka yang bertanggung jawab jika langkah ini tidak dihentikan dan mendesak militer mematuhi norma demokrasi dan supremasi hukum serta membebaskan mereka yang ditahan.

Anthony Blinken, Menteri Luar Negeri AS menyatakan keprihatinan dan memberikan peringatan terhadap kudeta yang terjadi di Myanmar. “Kami menyerukan kepada para pemimpin militer Myanmar untuk membebaskan semua pejabat pemerintah dan pemimpin masyarakat sipil dan menghormati keinginan rakyat Myanmar seperti yang diungkapkan dalam pemilihan umum demokratis pada 8 November,” kata Blinken, dikutip dari Reuters. “Amerika Serikat mendukung rakyat Myanmar terkait aspirasi mereka untuk demokrasi, kebebasan perdamaian, dan pembangunan. Militer harus segera membalikkan tindakan ini,” tegas Blinken (Indonesia, 2021).

Selain itu, Presiden Amerika Serikat Joe Biden berkata, “Dalam demokrasi, kekerasan tidak boleh berusaha untuk mengesampingkan keinginan rakyat atau berusaha untuk menghapus hasil pemilihan yang kredibel. Selama hampir satu dekade, rakyat Burma telah terus bekerja untuk menetapkan pemilihan umum, pemerintahan sipil, dan transfer kekuasaan secara damai. Kemajuan itu harus dihormati. Amerika Serikat memperhatikan orang-orang yang berdiri bersama rakyat Burma di saat-saat sulit ini. Kami akan bekerja sama dengan mitra kami di seluruh kawasan dan dunia untuk mendukung pemulihan demokrasi dan supremasi hukum, serta meminta pertanggungjawaban mereka yang bertanggung jawab untuk membatalkan transisi demokrasi Burma.”

Australia berpendapat pihak militer Myanmar dalam hal ini hanya ingin mengambil alih pemerintahan resmi dengan menahan Suu Kyi dan para pejabat lainnya. “Kami menyerukan militer Myanmar menghormati hukum dan menyelesaikan sengketa melalui mekanisme hukum,” kata Payne dilansir AFP. Ia menambahkan, “Kami juga mendesak militer Myanmar membebaskan seluruh pemimpin sipil dan mereka yang telah ditahan tidak sesuai hukum sesegara mungkin.”

Korea selatan membekukan kerjasama dalam bidang pertahanan serta memblokir perdagangan persenjataan ke Myanmar sebagai respon terhadap kudeta yang terjadi Myanmar sedangkan Jepang menghentikan semua bantuan baru untuk Myanmar. Penangguhan bantuan ini dapat diperluas berdasarkan Menteri Luar Negeri Jepang, Toshimitsu Motegi melalui surat kabar Nikkei pada 21 Mei 2021. “Kami tidak ingin melakukan itu sama sekali, tapi kami harus menyatakan dengan tegas bahwa sulit untuk melanjutkan dalam keadaan seperti ini,” ujar Motegi yang dilansir dari AFP. Ia melanjutkan, “Sebagai negara pendukung demokrasi Myanmar dengan berbagai cara dan sebagai sahabat, kami harus mewakili masyarakat internasional dan menyampaikan dengan jelas” (I.M.Paramadiba, 2021).

Inggris merespon melalui Perdana menteri Boris Johnson dengan berkata, “Saya mengecam kudeta dan penahanan tidak sah terhadap sejumlah warga sipil, termasuk Aung San Suu Kyi, di Myanmar. Suara rakyat harus dihormati dan para pemimpin sipil harus dibebaskan.”

Presiden Dewan Eropa, Charle Michel merespon dengan berkata, “Saya mengecam keras kudeta di Myanmar dan menyerukan kepada militer untuk membebaskan semua yang ditahan secara tidak sah dalam penggerebekan di berbagai wilayah negara itu. Hasil pemilu harus dihormati dan proses demokrasi perlu dipulihkan.”

Norwegia merespon dengan memberikan pernyataan, “Kami mengecam perkembangan hari ini di Myanmar. Kami mendorong para pemimpin militer untuk mematuhi norma demokrasi dan menghormati hasil pemilu.”

Menteri Luar Negeri kedua Brunei Darussalam, Erywan Yusof ditunjuk sebagai utusan khusus ke Myanmar oleh ASEAN dalam kesepakatan yang ditandatangani oleh para pemimpin ASEAN dalam pertemuan pada 24 April.

Presiden Indonesia Joko Widodo melalui tayangan Youtube Sekretariat Presiden mewakili seluruh rakyat Indonesia menyampaikan keprihatinan terhadap kudeta militer yang terjadi di Myanmar serta mendesak dihentikannya penggunaan kekerasan di Myanmar sehingga tidak ada korban berjatuhan, keselamatan dan kesejahteraan harus menjadi prioritas utama. Melalui halaman resmi Kementerian Luar Negeri, Indonesia mendesak semua pihak untuk menahan diri dan sangat prihatin atas kondisi politik di Myanmar. Dalam hal ini, prinsip-prinsip yang terkandung dalam Piagam ASEAN harus dihimbau, diantaranya pemerintahan yang baik, prinsip demokrasi, komitmen pada hukum, dan pemerintahan konstitusional. Perselisihan yang terjadi pada pemilihan umum dapat diselesaikan dengan mekanisme hukum yang ada. Indonesia meminta semua pihak di Myanmar untuk menggunakan pendekatan dialog dalam mencari jalan keluar agar situasi tidak semakin memburuk (T.P.Sorongan, RI Respon Resmi Kudeta Myanmar & Penahanan Aung San Suu Kyi, 2021).

### **Kudeta Militer Myanmar menurut Perspektif Hukum Internasional**

Kudeta militer dalam hukum internasional tidak diatur dengan jelas. Dirjen Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri RI, HE Abdul Kadir Jailani menjelaskan hukum internasional sejak perang dingin tidak mengatur dengan tegas aksi kudeta karena pada masa itu banyak terjadi kudeta di berbagai negara yang didukung oleh blok barat maupun blok timur. Hukum internasional mulai ada pergeseran ketika perang dingin berakhir. Dalam hal ini, Piagam PBB juga tidak mengatur dengan jelas aksi kudeta, hanya mengatur tentang prinsip dan kesetaraan non-intervensi yang dimana semua negara mempunyai posisi yang sama dan tidak boleh ikut campur urusan negara lain (F.M.Iqbal & Dwiprigitaningtias, 2021).

Dewan Keamanan PBB dalam praktiknya tidak mengatur jelas kudeta itu merupakan pelanggaran dalam hukum internasional atau tidak. “Dalam banyak peristiwa kudeta, DK PBB tidak melakukan apa-apa. Beginilah ketidakpastian hukum internasional dalam melihat (status hukum, red) aksi kudeta,” kata Abdul dalam diskusi secara daring bertajuk “*Coup d’etat Myanmar dari Aspek Hukum dan Hubungan Internasional*” yang digelar Indonesia Society of

Internasional Law Lecturers (ISILL) (Thea, 2021). ASEAN dalam piagamnya hanya menegaskan negara anggota harus patuh terhadap prinsip demokrasi, konstitusional, dan pemerintahan yang baik serta rule of law yang ada. Piagam ASEAN tidak mengatur dengan jelas sanksi apabila ada anggota yang melanggar prinsip tersebut hanya saja bila terjadi masalah, Piagam ASEAN mengatur jika ada pelanggaran atau ketidakpatuhan, persoalan ini diselesaikan di tingkat KTT atau ASEAN Summit (Thea, 2021).

## **KESIMPULAN**

Dari beberapa pembahasan yang telah disampaikan dapat disimpulkan, kudeta di Myanmar terjadi akibat klaim dari militer yang menganggap adanya kecurangan dalam pemilu yang berlangsung pada November 2020, walaupun komisi pemilihan menyatakan tidak ada bukti untuk mendukung klaim tersebut. Militer menganggap pemerintah gagal untuk menunda pemilihan dikarenakan pandemi. Tindakan ini dipertahankan oleh militer karena sesuai secara hukum dengan menggunakan konstitusi untuk mengambil alih pada saat-saat darurat. Ming Aung Hlaing mengeluarkan pernyataan usai kudeta kepada publik bahwa yang dilakukan militer itu benar dengan berada di pihak rakyat dan akan membentuk demokrasi yang adil. Protes terhadap kudeta yang dilakukan oleh militer terjadi secara besar-besaran setiap harinya. Aksi mogok juga terjadi atas protes terhadap kudeta yang terjadi. Pasukan militer Myanmar dalam demonstrasi ini telah membunuh sejumlah demonstran yang memprotes kudeta serta menahan jurnalis yang memberitakan kekerasan dalam kudeta militer yang terjadi.

Dalam hal ini respon dunia cukup beragam terhadap kudeta Myanmar, hampir semua negara setuju bahwa tindakan yang digunakan militer Myanmar merupakan kudeta terhadap pemerintahan. PBB sebagai induk dari hampir seluruh negara di dunia mengutuk keras tindakan kekerasan terhadap aksi damai demonstran, termasuk perempuan dan anak-anak serta menyerukan pembebasan segera orang yang ditahan. Menteri Luar Negeri kedua Brunei Darussalam ditunjuk sebagai utusan khusus Myanmar oleh ASEAN sebagai bentuk respon ASEAN terhadap kudeta di Myanmar.

Hukum internasional tidak mengatur dengan jelas bagaimana aksi kudeta militer dipandang. Dewan Keamanan PBB dalam praktiknya tidak mengatur jelas kudeta itu merupakan pelanggaran dalam hukum internasional atau tidak. Dalam banyak peristiwa kudeta, DK PBB tidak melakukan apa-apa. Beginilah ketidakpastian hukum internasional dalam melihat aksi kudeta. Sedangkan ASEAN hanya mengatur anggotanya untuk patuh

terhadap rule of law yang ada serta bila ada masalah, persoalan ini diselesaikan di tingkat KTT atau ASEAN Summit.

#### DAFTAR PUSTAKA

- D.V.Putsanra. (2021). *Apa Yang Terjadi di Myanmar Sekarang dan Penyebab Kudeta Militer*. Retrieved February 2, 2021, from Tirto id: <https://tirto.id/apa-yang-terjadi-di-myanmar-sekarang-dan-penyebab-kudeta-militer-f9SF>
- D.V.Putsanra. (2021). *Kasus Myanmar Sekarang : Penyebab Demo yang Tewaskan Angel & Lainnya*. Retrieved March 6, 2021, from Tirto id: <https://tirto.id/kasus-myanmar-sekarang-penyebab-demo-yang-tewaskan-angel-lainnya-gaUl>
- F.M.Iqbal, & Dwiprigitaningtias, I. (2021). Kudeta Militer Myanmar Dalam Perspektif Hukum Internasional. *Jurnal Dialektika Hukum Online Vol.3 No.1*.
- Haryanto, A. (2021). *Bagaimana Kisah Junta Militer Myanmar Kuasai Negara Melalui Kudeta?* Retrieved February 2, 2021, from Tirto id: <https://tirto.id/bagaimana-kisah-junta-militer-myanmar-kuasai-negara-melalui-kudeta-f9Tm>
- I.M.Paramadiba. (2021). *Ikuti Korea Selatan, Jepang Siapkan respon Terhadap Kudeta Myanmar*. Retrieved March 15, 2021, from Tempo: <https://dunia.tempo.co/read/1442325/ikuti-korea-selatan-jepang-siapkan-respon-terhadap-kudeta-myanmar>
- Indonesia, C. (2021). *Desak Suu Kyi Bebas, AS Ancam Bertindak Soal Kudeta Myanmar*. Retrieved February 1, 2021, from CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20210201105616-106-600769/desak-suu-kyi-bebas-as-ancam-bertindak-soal-kudeta-myanmar>
- Ivana, F. (2021). Kudeta Myanmar : Junta Militer di Era Modern . *Jurnal Pena Winaya*.
- News, T. (2021). *DK PBB Keluarkan Pernyataan Tegas Soal Kudeta Militer di Myanmar*. Retrieved March 11, 2021, from Tribun News: <https://m.tribunnews.com/internasional/2021/03/11/dk-pbb-keluarkan-pernyataan-tegas-soal-kudeta-militer-di-myanmar>
- R.I.Khladun. (2021). Implikasi Konflik Kudeta Militer Myanmar Terhadap Sanksi Internasional. *IJPSS : Indonesian Journal of Peace and Security Studies* .
- S.P.Sicca. (2021). *Kekerasan Kudeta Myanmar Terus Berlanjut, Jepang Ancam Hentikan Semua Bantuan*. Retrieved May 21, 2021, from KOMPAS: <https://www.kompas.com/global/read/2021/05/21/151102170/kekerasan-kudeta-myanmar-terus-berlanjut-jepang-ancam-hentikan-semua?page=all>
- T.P.Sorongan. (2021). *Bak Candu, Myanmar & Sejarah Kudeta Yang Terus Berulang*. Retrieved February 9, 2021, from CNBC Indonesia: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210209135949-4-222152/bak-candu-myanmar-sejarah-kudeta-yang-terus-berulang/2>
- T.P.Sorongan. (2021). *RI Respon Resmi Kudeta Myanmar & Penahanan Aung San Suu Kyi*. Retrieved February 1, 2021, from CNBC Indonesia:

<https://www.cnbcindonesia.com/news/20210201122101-4-220122/ri-respons-resmi-kudeta-myanmar-penahanan-aung-san-suu-kyi>

Thea, A. (2021). *Melihat Status Kudeta Militer dalam Perspektif Hukum Internasional*.

Retrieved March 30, 2021, from Hukum Online:

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt6062e1517d8b7/melihat-status-kudeta-militer-dalam-perspektif-hukum-internasional/?page=2>